

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

TAHUN 2025

KPKNL PADANGSIDIMPUAN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidimpuan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padangsidimpuan, 04 Mei 2026
Kepala KPKNL Padangsidimpuan,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Yulianto
NIP 19760121 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN**

JALAN KENANGA NOMOR 99, KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMATERA UTARA 22725;
TELEPON (0634) 21897; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL kpknsidimpuan@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padangsidimpuan, 04 Mei 2026
Kepala KPKNL Padangsidimpuan,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Yulianto
NIP 19760121 199603 1 001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.069.923.407,00 atau mencapai 126,88 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.419.643.000,00. Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp1.847.333.764,00 atau mencapai 36,31 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.088.191.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 21.057.450.528,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp14.441.295,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp21.043.009.233,00 dan Aset Lainnya (neto) Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15.865.267,00 dan Rp 21.041.585.261,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.943.059.077,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.337.889.789,00, terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp6.568.000,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp611.737.288,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp20.792.721.725,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp611.737.288,00 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp-362.873.753,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp21.041.585.261,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25		% Realisasi Anggaran	31-Dec-24
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		2.419.643.000	3.069.923.407	126,88	2.507.422.758
JUMLAH PENDAPATAN		2.419.643.000	3.069.923.407	126,88	2.507.422.758
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	2.061.244.000	1.690.477.950	82,01	1.725.405.902
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		2.061.244.000	1.690.477.950	82,01	1.725.405.902
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	3.026.947.000	156.855.814	5,18	839.524.989
Jumlah Belanja Modal		3.026.947.000	156.855.814	5,18	839.524.989
JUMLAH BELANJA		5.088.191.000	1.847.333.764	36,31	2.564.930.891

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisah dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	990	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	1.051.119	386.717.509
Persediaan	C.1.4	13.389.186	16.919.855
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.5	-	110.668.820
Jumlah Aset Lancar		14.441.295	514.306.184
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	14.642.622.000	14.642.622.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.929.271.027	4.375.759.930
Gedung dan Bangunan	C.2.3	5.482.712.547	5.482.712.547
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.4	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(4.011.596.341)	(3.824.196.236)
Jumlah Aset Tetap		21.043.009.233	20.676.898.241
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	517.847.340	220.641.361
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(517.847.340)	(220.641.361)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		21.057.450.528	21.191.204.425
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	1.636.767	393.882.700
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.4.3	14.228.500	4.600.000
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.5	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		15.865.267	398.482.700
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	21.041.585.261	20.792.721.725
JUMLAH EKUITAS		21.041.585.261	20.792.721.725
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21.057.450.528	21.191.204.425

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	2.943.059.077	2.536.860.036
JUMLAH PENDAPATAN		2.943.059.077	2.536.860.036
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	-	-
Beban Persediaan	D.2.2	107.534.297	160.200.445
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	809.627.506	810.944.428
Beban Pemeliharaan	D.2.4	441.419.872	359.685.787
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	336.012.592	435.652.195
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	643.295.522	551.701.529
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		2.337.889.789	2.318.184.384
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	605.169.288	218.675.652
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.4	6.568.000	74.938.000
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	6.568.000	74.938.000
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		611.737.288	293.613.652
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.7	611.737.288	293.613.652

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER
2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
EKUITAS AWAL	E.1	20.792.721.725	20.425.180.190
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	611.737.288	293.613.652
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	-	-
LAIN-LAIN	E.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	(362.873.753)	73.927.883
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	248.863.536	367.541.535
EKUITAS AKHIR	E.8	21.041.585.261	20.792.721.725

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan

Rencana Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan memiliki wilayah kerja meliputi 3 (tiga) kota yaitu Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli, dan 11 (sebelas) Kabupaten yaitu, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, KPKNL Padangsidimpuan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi:

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada KPKNL Padangsidimpuan, seluruh pegawai KPKNL Padangsidimpuan telah sepakat untuk menjalankan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Visi tersebut merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Padangsidimpuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Visi yang ditetapkan dapat diuraikan ke dalam phrasa "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara" adalah KPKNL Padangsidimpuan sebagai lembaga/institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan serta penatausahaan kekayaan negara termasuk dalam hal pengurusan piutang negara dan

pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.

Profesional adalah bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Akuntabel adalah bahwa pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Misi. Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Padangsidempuan melaksanakan program: Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Padangsidempuan untuk mendapatkan suatu hasil.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Padangsidimpuan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dimana keduanya sudah diakomodir kedalam aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan

dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pe

tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kew... pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos

pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2025 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan Rp

3.069.923.407,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.069.923.407,00 atau sebesar 126,88 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.419.643.000,00 pada Tahun 2025. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan terdiri dari Pendapatan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	31-Dec-25		
	Estimasi	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.155.330.000	1.833.428.273	158,69
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	953.000	3.000.174	314,81
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.260.360.000	1.154.184.150	91,58
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	6.568.000	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	500.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.000.000	28.499.750	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	43.743.060	-
Jumlah Kotor	2.419.643.000	3.069.923.407	126,88
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Jumlah Bersih	2.419.643.000	3.069.923.407	126,88

Realisasi Pendapatan Jasa Semester II Tahun 2025 mengalami kenaikan 70,53 persen dibandingkan Semester II Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada realisasi pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
	Realisasi	Realisasi		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.833.428.273	1.239.427.267	594.001.006	47,93
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	3.000.174	52.991.753	(49.991.579)	(94,34)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.154.184.150	1.140.065.738	14.118.412	1,24
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	-		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6.568.000	74.938.000	(68.370.000)	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	28.499.750	-	28.499.750	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	43.743.060	-	43.743.060	-
Jumlah Kotor	3.069.923.407	2.507.422.758	562.500.649	22,43
Pengembalian Pendapatan	-	-	-	-
Jumlah Bersih	3.069.923.407	2.507.422.758	562.500.649	22,43

Realisasi Belanja
Rp1.847.333.764, -

B.2. Belanja

Realisasi Belanja KPKNL Padangsidimpuan Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.847.333.764,00 atau 36,31 persen dari pagu belanja sebesar Rp5.088.191.000,00. Pada rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II Tahun 2025

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.061.244.000	1.690.477.950	82,01
Belanja Modal	3.026.947.000	156.855.814	5,18
Jumlah	5.088.191.000	1.847.333.764	36,31

Perbandingan antara realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Realisasi Belanja Semester II Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan (Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
Belanja Barang	1.690.477.950	1.725.405.902	(34.927.952)	(2,02)
Belanja Modal	156.855.814	839.524.989	(682.669.175)	(81,32)
Jumlah	1.847.333.764	2.564.930.891	(717.597.127)	(27,98)

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Semester II Tahun 2024, Realisasi Belanja Semester II Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 27,98% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran TA 2025 untuk belanja modal diblokir untuk belanja modal pembangunan rumah dinas.
2. Pagu Anggaran TA 2025 untuk belanja barang diblokir 50%

Belanja Pegawai
Rp0,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp0,00, hal ini dikarenakan akun belanja pegawai yang saat ini sudah terpusat sejak Semester III Tahun Anggaran 2020.

Belanja Barang
Rp1.690.477.950,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.690.477.950,00 dan Rp1.725.405.902,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 adalah 82,01 persen dari Pagu Belanja Barang Tahun 2025.

Tabel 7
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

URAIAN	Pagu	Realisasi 31/12/2025	% Realisasi
Belanja Barang Operasional	844.726.000	783.491.488	92,75
Belanja Barang Non Operasional	56.218.000	22.484.500	40,00
Belanja Jasa	7.200.000	3.065.870	42,58
Belanja Pemeliharaan	566.839.000	441.419.872	77,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	433.172.000	336.012.592	77,57
Belanja Persediaan	153.089.000	104.003.628	67,94
Jumlah Belanja Kotor	2.061.244.000	1.690.477.950	82,01
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.061.244.000	1.690.477.950	82,01

Apabila dibandingkan dengan periode Semester II Tahun 2024, Realisasi Belanja barang untuk periode Semester II Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp34.927.952,00 atau 2,02 persen. Hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran yang belum memenuhi target penyerapan untuk Tahun 2025.

Komposisi Realisasi Belanja Barang 2025 dapat dilihat dalam grafik:

Tabel 8
Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	783.491.488	656.536.480	126.955.008	19,34
Belanja Barang Non Operasional	22.484.500	35.831.400	(13.346.900)	(37,25)
Belanja Jasa	3.065.870	120.753.427	(117.687.557)	(97,46)
Belanja Pemeliharaan	441.419.872	359.685.787	81.734.085	22,72
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	336.012.592	435.652.195	(99.639.603)	(22,87)
Belanja Persediaan	104.003.628	116.946.613	(12.942.985)	(11,07)
Jumlah Belanja Kotor	1.690.477.950	1.725.405.902	(34.927.952)	(2,02)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	1.690.477.950	1.725.405.902	(34.927.952)	(2,02)

Belanja Modal
Rp156.855.814,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal KPKNL Padangsidimpuan untuk periode Semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp156.855.814,00 dan Rp839.524.989,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II Tahun 2025 mengalami penurunan dibanding Semester II Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya blokir anggaran pada belanja modal pada pagu TA 2025.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Peralatan dan Mesin	156.855.814	839.524.989	(81,32)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	156.855.814	839.524.989,00	(81,32)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	156.855.814	839.524.989	(81,32)

**Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp156.855.814,-**

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp156,855,814,00, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Semester II Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh jumlah pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 tidak sebesar tahun 2024.

*Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.855.814	839.524.989	-81,32
Jumlah Belanja Kotor	156.855.814	839.524.989	-81,32
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	156.855.814	839.524.989	-81,32

**Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp0,-**

B.5.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

*Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	-	-	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 merupakan anggaran untuk pembangunan 3 unit Rumah Negara KPKNL Padangsidempuan dengan rincian:

- 1 unit Rumah Negara tipe 70 yang berlokasi di Jalan Cempaka; dan
- 2 unit Rumah Negara tipe 50 yang berlokasi di Jalan BPDSU

Realisasi Semester II Tahun 2025 sebesar Rp0,00 disebabkan oleh blokir pagu anggaran belanja modal Gedung dan bangunan pada Pagu Anggaran TA 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp14.441.295,-

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.441.295,00 dan Rp514.306.184,00 atau turun sebesar 97,19 persen. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12
Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31/12/25	31/12/24	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	100%
Kas di Bendahara Penerimaan	990	-	990	1,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.051.119	386.717.509	(385.666.390)	(99,73)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	110.668.820	(110.668.820)	(100,00)
Persediaan	13.389.186	16.919.855	(3.530.669)	(20,87)
Jumlah	14.441.295	514.306.184	(499.864.889)	(97,19)

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00,-

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas penerimaan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp1.051.119,-

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.051.119,00 dan Rp386.717.509,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang pada bendahara pengeluaran dan bukan berasal dari UP/TUP, setara kas, dan kas lainnya pada bendahara penerimaan yang bukan merupakan pendapatan satker.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	31/12/2025	31/12/2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bea Lelang	-	-	-	-
Biaya Administrasi Piutang Negara	-	-	-	-
Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	-	-	-	-
Dana Pihak Ketiga	1.051.119	386.717.509	(385.666.390)	(99,7)
Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	-	-	-	-
Lain-Lain Piutang	-	-	-	-
Lain-Lain Lelang	-	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	-	-	-	-
Jumlah	1.051.119	386.717.509	(385.666.390)	(99,7)

Persediaan
Rp13.389.186,-

C.1.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp13.389.186,00 dan Rp16.919.855,00. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Realisasi Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Persediaan	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Konsumsi	13.389.186	16.919.855	(3.530.669)	-20,87
Jumlah	13.389.186	16.919.855	(3.530.669)	-20,87

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0,00,-

C.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp110.668.820,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Realisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024

Persediaan	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	110.668.820	(110.668.820)	-100,00
Jumlah	-	110.668.820	(110.668.820)	-100,00

Aset Tetap
Rp21.043.009.233,-

C.2 Aset Tetap

Aset tetap KPKNL Padangsidimpuan berdasarkan saldo menurut Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Perbandingan saldo Aset Tetap menurut LK per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	14.642.622.000	14.642.622.000	-	0
Peralatan dan Mesin	4.929.271.027	4.375.759.930	553.511.097	12,64949
Gedung dan Bangunan	5.482.712.547	5.482.712.547	-	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	0
Akumulasi Penyusutan	(4.011.596.341)	(3.824.196.236)	(187.400.105)	4,900379
Jumlah	21.043.009.233	20.676.898.241	366.110.992	1,77

Tanah
Rp14.642.622.000,-

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Padangsidimpuan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.642.622.000,00.

Tanah seluas 3540 m² yang terletak di Jl. Kenanga No. 99, Padangsidimpuan pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan sendiri untuk kegiatan operasional

Peralatan dan Mesin
Rp4.929.271.027,-

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

adalah masing-masing sebesar Rp4.929.271.027,00 dan Rp4.375.759.930,00. Dalam periode Semester II Tahun 2025 terdapat penambahan aset peralatan dan mesin.

Adapun mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Saldo per 31 Desember 2024	4.383.815.497
Mutasi tambah:	-
Pembelian	914.502.623
Pengembangan nilai aset	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.298.318.120
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	3.172.947.236
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.125.370.884

Mutasi tambah:

- a. Pembelian alat angkutan darat bermotor sebanyak 2 unit sebesar Rp867.326.923,00;
- b. Pembelian 2 unit komputer sebesar Rp47.175.700,00.

Gedung dan Bangunan
Rp5.482.712.547,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.482.712.547,00.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0,-

C.2.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp(4.011.596.341,-)

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.011.596.341,00 dan Rp3.824.196.236,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	14.642.622.000	0	14.642.622.000
2	Peralatan dan Mesin	4.929.271.027	3.172.947.236	1.756.323.791
3	Gedung dan Bangunan	5.482.712.547	838.649.105	4.644.063.442
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		25.054.605.574	4.011.596.341	21.043.009.233

**Kewajiban Jangka
Pendek**
Rp15.865.267,-

C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.865.267,00 dan Rp398.482.700,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga I dan Uang Muka dari KPPN. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19
Perbandingan saldo menurut LK 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Aset	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja barang yang masih harus dibayar	585.648	-	585.648	100,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	4.147.406	(4.147.406)	-100,00
Pendapatan Diterima di Muka	14.228.500	9.200.000	5.028.500	54,66
Uang Muka dari KPPN	-	48.000.000	(48.000.000)	-100,00
Dana Pihak Ketiga	1.051.119	337.135.294	(336.084.175)	-99,69
Jumlah	15.865.267	398.482.700	(382.617.433)	-96,02

**Utang kepada Pihak
Ketiga**
Rp1.051.119,-

C.3.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.051.119,00 dan Rp393.882.700,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per akun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian Akun	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan (Penurunan)	
				Rupiah	%
212192	Dana Pihak Ketiga	1.051.119	337.135.294	-336.084.175	-99,69
212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	0	0	0	0,00
212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	0	56.747.406	-56.747.406	-100,00
Total		1.051.119	393.882.700	-392.831.581	-199,69

Pendapatan Diterima Di Muka
Rp14.228.500,-

C.3.2 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.228.500,00 dan Rp4.600.000,00. Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 merupakan pendapatan atas sewa tanah, Gedung atau bangunan yang diterima oleh KPKNL Padangsidimpuan.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00,-

C.3.3 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0,-

C.3.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan.

Ekuitas
Rp21.041.585.261,-

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.041.585.261,00 dan Rp20.792.721.725,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional periode 31 Desember 2025 disandingkan dengan Laporan Operasional periode 31 Desember 2024.

**Pendapatan
Operasional
Rp2.943.059.077,-**

D.1 Pendapatan Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional pada KPKNL Padangsidimpuan adalah sebesar Rp2.943.059.077,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

*Tabel 21
Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Perpajakan	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.943.059.077	2.507.422.758	17,37
Jumlah	2.943.059.077	2.507.422.758	17,37

**Pendapatan PNB
Rp2.943.059.077,-**

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.943.059.077,00 dan Rp2.507.422.758,00. Jika dibandingkan dengan PNB periode 31 Desember 2024, maka mengalami kenaikan sebesar Rp406.199.041,00 atau 16,01 persen. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Rincian pendapatan penerimaan negara bukan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 22
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	18.871.250	-	18.871.250	100,00
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.722.759.453	1.239.427.267	483.332.186	39,00
Pendapatan Biad Piutang Negara	3.001.164	52.991.753	(49.990.589)	(94,34)
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000	-	500.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.154.184.150	1.140.065.738	14.118.412	1,24
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	74.938.000	(74.938.000)	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	43.743.060	-	43.743.060	(100,00)
Jumlah	2.943.059.077	2.507.422.758	435.636.319	17,37

Beban Operasional
Rp2.337.889.789,-

D.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Beban Operasional pada KPKNL Padangsidempuan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.337.889.789,00 dan Rp2.318.184.384,00

Rincian Beban Operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23
Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	-	-	-	-
Beban Persediaan	107.534.297	160.200.445	(52.666.148)	(32,88)
Beban Barang dan Jasa	809.627.506	810.944.428	(1.316.922)	(0,16)
Beban Pemeliharaan	441.419.872	359.685.787	81.734.085	22,72
Beban Perjalanan Dinas	336.012.592	435.652.195	(99.639.603)	(22,87)
Beban Penyusutan Amortisasi	643.295.522	551.701.529	91.593.993	16,60
Jumlah	2.337.889.789	2.318.184.384	19.705.405	0,85

Beban Pegawai
Rp0,-

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp107.534.297,-

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp107.534.297,00 dan Rp160.200.445,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2025	31/12/2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	107.534.297	160.200.445	(52.666.148)	(32,88)
Jumlah Beban Persediaan	107.534.297	160.200.445	(52.666.148)	(32,88)

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang dan
Jasa
Rp809.627.506,-**

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp809.627.506,00 dan Rp810.944.428,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena pengguna alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2025	31/12/2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	591.739.348	550.022.105	41.717.243	7,58
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	26.614.840	12.352.575	0	0,00
Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi Covid	0	0	0	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.097.300	23.113.800	-4.016.500	(17,38)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95.520.000	68.796.000	26.724.000	38,85
Beban Barang Operasional Lainnya	50.520.000	2.252.000	48.268.000	2143,34
Beban Bahan	22.274.500	35.506.400	(13.231.900)	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	210.000	325.000	-115000	0
Beban Langganan Listrik	0	95.525.012	(95.525.012)	(100,00)
Beban Langganan Telepon	0	12.191.685	(12.191.685)	(100,00)
Beban Langganan Air	3.651.518	3.694.660	(43.142)	(1,17)
Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid	0	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0,00
Beban Sewa	0	0	0	0,00
Jumlah	809.627.506	803.779.237	5.848.269	0,73

Adapun untuk Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid, realisasi terakhir adalah periode Semester II 2025 dan tidak ada penggunaan/realisasi setelah periode tersebut. Dan untuk Beban Jasa – penanganan pandemic Covid tidak ada realisasi sepanjang tahun 2025.

**Beban
Pemeliharaan
Rp441.419.872,-**

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp441.419.872,00 dan Rp359.685.787,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2025	31/12/2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	206.885.122	225.352.550	-18.467.428	(8,19)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.534.750	134.333.237	100.201.513	74,59
Jumlah	441.419.872	359.685.787	81.734.085	22,72

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp336.012.592,-**

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp336.012.592,00 dan Rp435.652.195,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh berakhirnya kegiatan revaluasi serta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 27
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2025	31/12/2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	324.812.592	428.877.195	(104.064.603)	(24,26)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000	6.775.000	4.425.000	100,00
Jumlah	336.012.592	435.652.195	(99.639.603)	(22,87)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp643.295.522,-

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp643.295.522,00 dan Rp551.701.529,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 28

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Basis Akrua per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	30/06/2025	30/06/2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	520.503.186	428.954.953	91.548.233	21,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	122.511.286	122.511.286	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	281.050	235.290	45.760	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	643.295.522	551.701.529	91.593.993	16,60

Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Operasional
Rp605.169.288,-

D.3 Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode Pelaporan. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar surplus Rp605.169.288,00 dan surplus Rp218.675.652,00. Surplus Kegiatan Operasional merupakan selisih antara total Pendapatan Operasional sebesar Rp2.943.059.077,00 dan total beban Operasional sebesar Rp2.337.889.789,00.

Surplus /(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar
Rp6.568.000,00,-

D.4 Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah surplus masing-masing sebesar Rp6.568.000,00 dan Rp74.938.000,00. Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 merupakan selisih dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp6.568.000,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00.

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp0,-

D.5 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara total Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 dan total Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp6.568.000,00,-

D.6 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024, surplus masing-masing adalah Rp6.568.000,00 dan Rp74.938.000,00.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN		31/12/2025	31/12/2024	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		6.568.000	74.938.000	(68.370.000)	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		6.568.000	74.938.000	(68.370.000)	(91,24)

Surplus/Defisit
laporan
Operasional
Rp611.737.288,-

D.7 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar Rp611.737.288,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas KPKNL Padangsidimpuan adalah kekayaan bersih KPKNL Padangsidimpuan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban KPKNL Padangsidimpuan pada laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dengan periode sebelumnya.

*Ekuitas Awal
Rp20.792.721.725,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.792.721.725,00 dan Rp20.425.180.190,00.

*Surplus LO
Rp611,737,288,-*

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah surplus Rp611.737.288,00 dan Rp293.613.652,00. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
/Kesalahan
Mendasar Rp0,-*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00.

*Koreksi Yang
Mengurangi
Ekuitas Rp0,-*

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,-*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Koreksi Atas**Reklasifikasi Rp0,-****E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Selisih Revaluasi**Aset Tetap Rp0,-****E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah dan bangunan milik satker di Jl. Kenanga No.99 Padangsidimpuan.

Koreksi Aset Tetap**Non Revaluasi****Rp0,-****E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00.

Lain-Lain Rp0,-**E.5 Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Transaksi Antar**Entitas****(Rp362.873.753,00,-)****E.6 Transaksi Antar Entitas**

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain. Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp362.873.753,00) dan Rp338.852.573,00.

Kenaikan Ekuitas**Rp248.863.536,-****E.7 Kenaikan/Penurunan Ekuitas**

Kenaikan Ekuitas terjadi karena adanya penambahan nilai aset. Kenaikan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp248.863.536,00 dan Rp367.541.535,00.

Ekuitas Akhir**Rp21.041.585.261,-****E.8 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.041.585.261,00 dan Rp20.792.721.725,00. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal, ekuitas, surplus/defisit LO, penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan medasar dan transaksi antar entitas.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, telah terbit DIPA Revisi Ketujuh dengan rincian sebagai berikut :

Output	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi
4796.AEF	37.724.000	37.724.000
4798.AAH	114.696.000	114.696.000
4798.ABA	28.000.000	28.000.000
4798.BAH	23.666.000	23.666.000
4798.FAE	76.384.000	76.384.000
4798.UAE	17.828.000	17.828.000
4700.EBA	28.228.000	28.228.000
4701.EBA	1.682.694.000	1.682.694.000
4701.EBB	2.870.026.000	2.870.026.000
4702.BMB	24.118.000	24.118.000
4704.EBD	20.428.000	20.428.000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:16 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,943,059,077	2,536,860,036	406,199,041	16.012
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,943,059,077	2,536,860,036	406,199,041	16.012
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,943,059,077	2,536,860,036	406,199,041	16.012
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	107,534,297	160,200,445	(52,666,148)	(32.875)
Beban Barang dan Jasa	809,627,506	810,944,428	(1,316,922)	(0.162)
Beban Pemeliharaan	441,419,872	359,685,787	81,734,085	22.724
Beban Perjalanan Dinas	336,012,592	435,652,195	(99,639,603)	(22.871)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:16 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	643,295,522	551,701,529	91,593,993	16.602
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,337,889,789	2,318,184,384	19,705,405	0.85
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	605,169,288	218,675,652	386,493,636	176.743
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	6,568,000	74,938,000	(68,370,000)	(91.235)
Pendapatan Pelepasan Aset	6,568,000	74,938,000	(68,370,000)	(91.235)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	6,568,000	74,938,000	(68,370,000)	(91.235)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	611,737,288	293,613,652	318,123,636	108.348
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	611,737,288	293,613,652	318,123,636	108.348

AGUS YULIANTO
NIP 197601211996031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:16 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,792,721,725	20,425,180,190	367,541,535	1.8
SURPLUS/DEFISIT-LO	611,737,288	293,613,652	318,123,636	108.35
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1	0	1	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	1	0	1	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(362,873,753)	73,927,883	(436,801,636)	(590.85)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	248,863,536	367,541,535	(118,677,999)	(32.29)
EKUITAS AKHIR	21,041,585,261	20,792,721,725	248,863,536	1.2

Keterangan :

FINAL

Padangsidempuan, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AGUS YULIANTO

NIP 197601211996031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN 506090

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:17 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,419,643,000	3,069,923,407	650,280,407	127	1,775,433,000	2,507,422,758	(731,989,758)	141
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,419,643,000	3,069,923,407	650,280,407	127	1,775,433,000	2,507,422,758	(731,989,758)	141
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,419,643,000	3,069,923,407	650,280,407	127	1,775,433,000	2,507,422,758	(731,989,758)	141
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,088,191,000	1,847,333,764	(3,240,857,236)	36	2,847,662,000	2,564,930,891	282,731,109	90
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,061,244,000	1,690,477,950	(370,766,050)	82	1,998,943,000	1,725,405,902	273,537,098	86
3. Belanja Modal	3,026,947,000	156,855,814	(2,870,091,186)	5	848,719,000	839,524,989	9,194,011	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015

ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN 506090

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:17 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,088,191,000	1,847,333,764	(3,240,857,236)	36	2,847,662,000	2,564,930,891	282,731,109	90
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Padangsidimpuan, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AGUS YULIANTO
NIP 197601211996031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	990	0	990	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,051,119	386,717,509	(385,666,390)	(99.73)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	110,668,820	(110,668,820)	(100.00)
Persediaan	13,389,186	16,919,855	(3,530,669)	(20.87)
JUMLAH ASET LANCAR	14,441,295	514,306,184	(499,864,889)	(97.19)
ASET TETAP				
Tanah	14,642,622,000	14,642,622,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,929,271,027	4,375,759,930	553,511,097	12.65
Gedung dan Bangunan	5,482,712,547	5,482,712,547	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,011,596,341)	(3,824,196,236)	(187,400,105)	4.90
JUMLAH ASET TETAP	21,043,009,233	20,676,898,241	366,110,992	1.77
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	517,847,340	220,641,361	297,205,979	134.70
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(517,847,340)	(220,641,361)	(297,205,979)	134.70
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	21,057,450,528	21,191,204,425	(133,753,897)	(0.63)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,636,767	393,882,700	(392,245,933)	(99.58)
Pendapatan Diterima Dimuka	14,228,500	4,600,000	9,628,500	209.32
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,865,267	398,482,700	(382,617,433)	(96.02)
JUMLAH KEWAJIBAN	15,865,267	398,482,700	(382,617,433)	(96.02)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	21,041,585,261	20,792,721,725	248,863,536	1.20
JUMLAH EKUITAS	21,041,585,261	20,792,721,725	248,863,536	1.20
JUMLAH EKUITAS	21,041,585,261	20,792,721,725	248,863,536	1.20
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,057,450,528	21,191,204,425	(133,753,897)	(0.63)

Keterangan :

FINAL

Padangsidimpun, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AGUS YULIANTO

NIP 197601211996031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	990	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,051,119	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	13,389,186	0
0.0	131111	Tanah	14,642,622,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,929,271,027	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,482,712,547	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,172,947,236
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	838,649,105
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	517,847,340	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	517,847,340
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	585,648
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,051,119
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	14,228,500
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,847,333,764
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,069,923,407	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	7,165,190
0.0	313221	Transfer Masuk	0	852,550,700
0.0	391111	Ekuitas	0	20,792,721,725
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	6,568,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,871,250
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,722,759,453
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,154,184,150
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	3,001,164
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	43,743,060
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	591,739,348	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	26,614,840	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,097,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	50,520,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	22,274,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	210,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,651,518	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	206,885,122	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234,534,750	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	324,812,592	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,200,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 10:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	520,503,186	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	122,511,286	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	281,050	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	107,534,297	0
JUMLAH			30,994,707,405	30,994,707,405

Keterangan :

FINAL

Padangsidimpuan, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AGUS YULIANTO
NIP 197601211996031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 10:17 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,847,333,764
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,069,923,407	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	6,568,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	28,499,750
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,833,428,273
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,154,184,150
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	3,000,174
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	43,743,060
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	591,739,348	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	26,614,840	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,097,300	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	50,520,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	22,274,500	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	210,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	104,003,628	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,065,870	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	206,885,122	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234,534,750	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	324,812,592	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,200,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156,855,814	0
JUMLAH			4,917,257,171	4,917,257,171

Keterangan :
FINAL

Padangsidempuan, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AGUS YULIANTO
197601211996031001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 10:40 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		18	8,055,567	0	0	4	1,000,000	14	7,055,567
3050105010	White Board	-	1	814,501	0	0	0	0	1	814,501
3050201002	Meja Kerja Kayu	-	2	1,999,450	0	0	0	0	2	1,999,450
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	4	1,000,000	0	0	4	1,000,000	0	0
3050201004	Kursi Kayu	-	4	1,998,000	0	0	0	0	4	1,998,000
3050206071	Kabel	-	1	378,000	0	0	0	0	1	378,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	-	6	1,865,616	0	0	0	0	6	1,865,616
133111	Gedung dan Bangunan		2	44,000,000	0	0	2	44,000,000	0	0
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	-	2	44,000,000	0	0	2	44,000,000	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		10	2,690,000	6	45,000,000	10	2,690,000	6	45,000,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	10	2,690,000	4	1,000,000	10	2,690,000	4	1,000,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	-	0	0	2	44,000,000	0	0	2	44,000,000
TOTAL				54,745,567		45,000,000		47,690,000		52,055,567

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 10:41 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		5,827	14,642,622,000	0	0	0	0	5,827	14,642,622,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	972	1,238,267,000	0	0	0	0	972	1,238,267,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	391	340,483,000	0	0	0	0	391	340,483,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	4,464	13,063,872,000	0	0	0	0	4,464	13,063,872,000
132111	Peralatan dan Mesin		537	4,375,759,930	27	1,071,358,437	135	517,847,340	429	4,929,271,027
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	246,125,000	0	0	0	0	1	246,125,000
3020101003	Station Wagon	Unit	0	0	1	400,300,000	0	0	1	400,300,000
3020101999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	dummy	0	0	1	467,026,923	0	0	1	467,026,923
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	1,155,980,001	0	0	0	0	4	1,155,980,001
3020104001	Sepeda Motor	Unit	7	152,372,499	0	0	0	0	7	152,372,499
3020201009	Baggage Trolly	Unit	1	1,750,000	0	0	1	1,750,000	0	0
3030301131	Wheel Meter	Buah	4	3,062,964	0	0	0	0	4	3,062,964
3030301141	Distance Meter	unit	3	6,178,023	0	0	0	0	3	6,178,023
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	33,999,999	1	45,000,000	0	0	2	78,999,999
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	2	127,050,000	0	0	0	0	2	127,050,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	18	103,315,000	5	22,275,000	4	11,975,000	19	113,615,000
3050104003	Rak Besi	Buah	24	55,236,000	0	0	0	0	24	55,236,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	20	88,449,250	0	0	6	21,408,000	14	67,041,250
3050104007	Brandkas	Buah	2	9,700,000	0	0	1	4,850,000	1	4,850,000
3050104015	Locker	Buah	0	0	6	27,431,244	0	0	6	27,431,244
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	11	9,320,000	0	0	0	0	11	9,320,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	31,140,000	0	0	0	0	3	31,140,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2,810,500	0	0	1	2,810,500	0	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	17,341,900	0	0	1	8,400,000	1	8,941,900
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	0	0	1	2,200,000	0	0	1	2,200,000
3050105028	Overhead Projector	Buah	1	9,512,000	0	0	1	9,512,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	34,775,000	0	0	1	24,000,000	1	10,775,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	1	2,337,500	0	0	1	2,337,500	0	0
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	8,492,000	0	0	0	0	2	8,492,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	3,960,000	0	0	0	0	2	3,960,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	55	135,060,570	10	59,949,570	21	51,985,000	44	143,025,140
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	143	183,576,669	0	0	50	27,712,000	93	155,864,669
3050201005	Sice	Buah	12	67,298,810	0	0	6	24,495,000	6	42,803,810
3050201008	Meja Rapat	Buah	16	35,760,000	0	0	0	0	16	35,760,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	5	31,700,000	0	0	0	0	5	31,700,000
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	3	17,400,000	0	0	0	0	3	17,400,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 10:41 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204001	Lemari Es	Buah	5	13,930,000	0	0	0	0	5	13,930,000
3050204004	A.C. Split	Buah	33	175,592,325	0	0	0	0	33	175,592,325
3050204007	Exhause Fan	Buah	3	1,050,000	0	0	2	700,000	1	350,000
3050206002	Televisi	Buah	3	18,975,000	0	0	0	0	3	18,975,000
3050206008	Sound System	Buah	3	45,500,000	0	0	0	0	3	45,500,000
3050206012	Wireless	Buah	1	5,600,000	0	0	0	0	1	5,600,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	14	37,908,310	0	0	6	26,028,310	8	11,880,000
3050206019	Stabilisator	Buah	2	1,550,000	0	0	0	0	2	1,550,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	475,000	0	0	0	0	1	475,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	1,250,000	0	0	0	0	1	1,250,000
3050206036	Dispenser	Buah	3	6,910,000	0	0	0	0	3	6,910,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	6,360,000	0	0	1	6,360,000	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	1	5,200,000	0	0	1	5,200,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	2	74,328,224	0	0	1	25,000,000	1	49,328,224
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,800,000	0	0	0	0	1	2,800,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	1	3,425,000	0	0	0	0	1	3,425,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	80,730,686	0	0	3	68,062,150	3	12,668,536
3060101088	Voice Recorder	Buah	1	741,000	0	0	1	741,000	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	2	44,478,000	0	0	0	0	2	44,478,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3060102166	End Point Vicon	unit	1	128,526,500	0	0	0	0	1	128,526,500
3060105038	GPS Receiver	Buah	2	7,639,662	0	0	0	0	2	7,639,662
3060201010	Facsimile	Buah	1	3,417,000	0	0	1	3,417,000	0	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	5	5,500,000	0	0	4	4,400,000	1	1,100,000
3100102001	P.C Unit	Buah	15	252,114,366	0	0	5	83,205,700	10	168,908,666
3100102002	Lap Top	Buah	29	353,508,586	2	47,175,700	1	12,585,326	30	388,098,960
3100102009	Tablet PC	Buah	1	10,795,000	0	0	0	0	1	10,795,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	4,900,000	0	0	0	0	1	4,900,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	32,590,346	0	0	8	17,852,646	4	14,737,700
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	88,079,544	0	0	0	0	6	88,079,544
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4,800,000	0	0	4	4,800,000	0	0
3100204001	Server	Buah	2	66,709,208	0	0	2	66,709,208	0	0
3100204002	Router	Buah	1	45,259,500	0	0	0	0	1	45,259,500
3100204003	Hub	Buah	1	9,795,500	0	0	0	0	1	9,795,500
3100204008	rack Modem	Buah	1	6,935,500	0	0	0	0	1	6,935,500
3100204020	CAT 6 Cable	Buah	1	2,612,061	0	0	0	0	1	2,612,061

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 10:41 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204023	Wireless Access Point	Buah	9	118,716,006	0	0	0	0	9	118,716,006
3100204024	Switch	Buah	2	106,343,921	0	0	0	0	2	106,343,921
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	10	15,510,000	0	0	1	1,551,000	9	13,959,000
133111	Gedung dan Bangunan		4	5,482,712,547	0	0	0	0	4	5,482,712,547
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	4,253,909,333	0	0	0	0	1	4,253,909,333
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	508,827,842	0	0	0	0	1	508,827,842
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	2	719,975,372	0	0	0	0	2	719,975,372
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		74	220,641,361	135	517,847,340	74	220,641,361	135	517,847,340
3020201009	Baggage Trolly	Unit	0	0	1	1,750,000	0	0	1	1,750,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	48,621,000	0	0	1	48,621,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	8	15,000,000	0	0	8	15,000,000	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	4	11,975,000	0	0	4	11,975,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	4,000,000	6	21,408,000	2	4,000,000	6	21,408,000
3050104007	Brandkas	Buah	0	0	1	4,850,000	0	0	1	4,850,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0	1	2,810,500	0	0	1	2,810,500
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	1	8,400,000	0	0	1	8,400,000
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	1	9,512,000	0	0	1	9,512,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	1	24,000,000	0	0	1	24,000,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	1	2,337,500	0	0	1	2,337,500
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	5	2,630,000	21	51,985,000	5	2,630,000	21	51,985,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	39	32,332,600	50	27,712,000	39	32,332,600	50	27,712,000
3050201005	Sice	Buah	0	0	6	24,495,000	0	0	6	24,495,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	5	3,388,000	0	0	5	3,388,000	0	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	0	0	2	700,000	0	0	2	700,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	0	0	6	26,028,310	0	0	6	26,028,310
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	0	0	1	6,360,000	0	0	1	6,360,000
3050206046	Handy Cam	Buah	0	0	1	5,200,000	0	0	1	5,200,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	0	0	1	25,000,000	0	0	1	25,000,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	3	68,062,150	0	0	3	68,062,150
3060101088	Voice Recorder	Buah	0	0	1	741,000	0	0	1	741,000
3060102003	Camera Electronic	Buah	3	17,215,000	0	0	3	17,215,000	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	3	10,904,223	0	0	3	10,904,223	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	1	3,417,000	0	0	1	3,417,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	0	0	4	4,400,000	0	0	4	4,400,000
3100102001	P.C Unit	Buah	1	8,973,360	5	83,205,700	1	8,973,360	5	83,205,700
3100102002	Lap Top	Buah	5	73,677,178	1	12,585,326	5	73,677,178	1	12,585,326
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	3,900,000	8	17,852,646	2	3,900,000	8	17,852,646

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 10:41 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	4	4,800,000	0	0	4	4,800,000
3100204001	Server	Buah	0	0	2	66,709,208	0	0	2	66,709,208
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	0	0	1	1,551,000	0	0	1	1,551,000
TOTAL				24,721,735,838		1,589,205,777		738,488,701		25,572,452,914

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.506090/2025

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.57) SUMATERA UTARA / KOTA PADANG SIDEMPUAN

KPPN : (006) Padang Sidempuan

Satuan Kerja : (506090) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00088/DRPP/506090/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	54.907.500,00	389.701.370,00	444.608.870,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	54.907.500,00	389.701.370,00	444.608.870,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	54.907.500,00	191.290.155,00	246.197.655,00	0,00
	1. BP UP*)	47.325.000,00	45.804.167,00	93.129.167,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	7.582.500,00	61.601.707,00	69.184.207,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	21.384.281,00	21.384.281,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
AGUS YULIANTO
NIP 197601211996031001

KOTA PADANG SIDEMPUAN, 08 Januari 2026

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
SARAH GABRIELLA BARUS
NIP 199910032021012003

Dicetak pada tanggal 08 Januari 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **001/06**
 Tanggal : **01 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima 01 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☒ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	49,149,700	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		49,149,700

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **002/06**
 Tanggal : **01 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Balik Pendapatan Diterima Di Muka 1 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☒ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	28,457,000	
	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		28,457,000

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **003/06**
 Tanggal : **01 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Balik Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	549,960	
	K	522113	Beban Langganan Air		549,960

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidimpuan**
 No. Dokumen : **PERJ-01/KNL.0204/2025**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka 31 Desember 2025 (PERJ-01/KNL.0204/2025)**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☒ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,228,500	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		14,228,500

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **PERJ-01/KNL.0204/2025**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Balik Pendapatan Diterima Di Muka 31 Desember 2025 (PERJ-01/KNL.0204/2025)**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☒ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	14,228,500	
	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		14,228,500

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **001/06**
 Tanggal : **01 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☒ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	49,149,700	
	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		49,149,700

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **001/06**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☒ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	49,149,700	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		49,149,700

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **01/12/2025**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Penyesuaian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☒ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111711	Kas Di Bendahara Penerimaan	990	
	K	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		990

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **02/12/2025**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☒ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	990	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		990

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **03/12/2025**
 Tanggal : **31 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka 31 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☒ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,228,500	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		14,228,500

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : **Kementerian Keuangan**
 Eselon I : **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**
 Wilayah : **Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara**
 Satuan Kerja : **KPKNL Padangsidempuan**
 No. Dokumen : **04/12/2026**
 Tanggal : **01 Desember 2025**
 Tahun Anggaran : **2025**
 Keterangan : **Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025**

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	522113	Beban Langganan Air	585,648	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		585,648

Dibuat oleh :
Kasubbag Umum

Disetujui oleh :
Kepala Kantor

Direkam oleh :
Operator GLP



Ditandatangani secara elektronik
 Hendra Putra Irawan
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Agus Yulianto
 Tanggal: 04 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik
 Nico Yudha Manurung
 Tanggal: 04 Mei 2026



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (506090) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan

Kode dan Nama UAPPAW : (07) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		✓
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓

3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak

	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak

PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak

2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya/Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		√	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		√	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		√	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		√	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?		√	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		√	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		√	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		√	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		√	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		√	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		√	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		√	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				

Mengetahui
Penelaah,



Ditandatangani secara elektronik
Hendra Putra Irawan
NIP 198504152004121001

Padangsidempuan, 04 Mei 2026
Pejabat Penyusun LKKL,



Ditandatangani secara elektronik
Nico Yudha Manurung
NIP 199908152021011001

